

**KAPASITAS PEMERINTAH NAGARI SILAYANG DALAM MENGELOLA
POTENSI NAGARI SILAYANG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
NAGARI SILAYANG KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN KABUPATEN
PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018**

Oleh : Mustafa Alfajri

Alfajrimustafa8@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-6377

ABSTRACT

Nagari Silayang is one of the villages in Indonesia that has considerable natural and human resource potential. However, even though it has abundant potential, the village's original income (PADes) is still low. This can hinder the development and welfare of the village community as a whole. Therefore, it is necessary to manage village potential that is appropriate and sustainable to increase the village's original income and the welfare of the people of Silayang Village.

This study aims to find out how the Capacity Development of the Nagari Silayan Government in Managing the Potential of Nagari Silayang to Increase Nagari Silayang's Original Income in 2018. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation.

The results of this study show that the management of the potential of Nagari Silayang by the Nagari Silayang government has been carried out by strengthening human resources, strengthening organizations and institutional reforms to encourage the Nagari Silayang government to increase the village's original income through effective management of Nagari potential. The obstacles that occur in managing the potential of the Nagari Silayang area are human resources, capital and the environment. The capacity development of the Nagari Silayang government in managing its regional potential has not been carried out properly, this is due to obstacles in developing the capacity of the Nagari government such as weak human resources and limited village supervision.

Keywords : The Capacity Of The Nagari Silayang Government, Potential Management

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Nagari Silayang merupakan salah satu desa di Indonesia yang memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang cukup besar. Namun, meskipun memiliki potensi yang melimpah, pendapatan asli desa (PADes) yang dihasilkan masih rendah. Hal ini dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan potensi desa yang tepat guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Silayang.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan potensi desa adalah sektor pertanian. Nagari Silayang memiliki lahan pertanian yang subur dan berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi. Namun, masih terdapat kendala dalam pengelolaan lahan pertanian, seperti kurangnya akses terhadap pasar, kurangnya keterampilan petani dalam menerapkan teknik pertanian modern, dan kurangnya infrastruktur pendukung.

Selain sektor pertanian, Nagari Silayang juga memiliki potensi pariwisata yang dapat menjadi sumber pendapatan asli desa. Desa ini memiliki keindahan alam yang menarik, seperti pegunungan, air terjun, dan danau. Namun, potensi pariwisata tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli desa. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Nagari Silayang. UMKM merupakan salah

satu sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi yang besar, termasuk dalam peningkatan pendapatan asli desa. Namun, UMKM di Nagari Silayang masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya akses terhadap modal, keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan bisnis, dan minimnya promosi dan pemasaran produk.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis potensi desa Silayang yang dapat dikelola untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini akan melibatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan data tentang potensi desa, seperti survei, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi kendala yang ada dalam pengelolaan potensi desa dan menyusun strategi pengelolaan yang tepat guna. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa dan stakeholder terkait dalam pengembangan potensi desa Silayang. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang mendukung pengelolaan potensi desa secara efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data sumber data dari APBDes Nagari Silayang tahun 2021, total jumlah belanja Apbdes Nagari silayang berjumlah Rp.2.455.421.800,00 dan surplus/defisit apbdes nagari silayang berjumlah Rp. 15.239.930.00, dengan jumlah pembiayaan nol rupiah atau tidak ada. Dari anggaran dan pendapatan Nagari silayang penulis menyimpulkan rata

pembelanjaan Nagari silayang rata-rata masih banyak di alokasikan kepada pembelanjaan barang dan jasa dan pembelanjaan modal.

Di samping itu, terdapat pula potensi kerajinan lokal yang unik dan beragam di Nagari Silayang. Kerajinan tersebut meliputi anyaman, tenun, ukiran kayu, dan produk-produk kreatif lainnya. Namun, potensi kerajinan ini belum dikembangkan secara optimal dan belum memiliki akses yang baik ke pasar. Meskipun Desa Silayang memiliki potensi yang besar, pendapatan asli daerah yang dihasilkan masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya akses terhadap pasar, kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan potensi desa, serta minimnya infrastruktur pendukung dan dukungan pemerintah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Kapasitas Pemerintah Nagari Silayang dalam mengelola potensi-potensi unggulan Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggal Selatan untuk dapat dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli Nagari tersebut. Penelitian ini akan melibatkan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data tentang potensi desa, melakukan survei, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul akan dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan potensi desa dan merumuskan strategi pengelolaan yang tepat guna.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas Pengelolaan Potensi Nagari Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Silayang Kecamatan Mapatunggal Selatan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat Tahun 2022 belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kapasitas Pemerintah Nagari Silayang dalam meningkatkan potensi nagari silayang.
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pemerintah desa dalam menanggulangi konflik di Nagari Silayang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja langkah pemerintahan Nagari Silayang dalam mengelola potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Nagari silayang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana pengelolaan potensi daerah Nagari Silayang dalam meningkatkan pendapatan asli daeah nagari silayang.

D. KERANGKA TEORI

a. Kapasitas

Kapasitas Desa terutama Pemerintah Desa bukan sekadar kesanggupan dan kelancaran pemerintah desa menjalankan tugas pokok dan fungsinya atau mengikuti prosedur administrasi yang sudah baku Kapasitas

dalam konteks ini adalah penguasaan pengetahuan dan informasi maupun keterampilan menerapkan instrumen kebijakan dan program untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien. Yang lebih penting kapasitas merupakan prakarsa untuk melakukan inovasi atau pembaharuan terhadap pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar desa berkembang lebih dinamis dan maju mencapai visi-misi yang digariskan. Kapasitas organisasi merupakan potensi-potensi yang memungkinkan sebuah institusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan program-program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik dilingkungan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah (Wardianto dalam Madiyono,2016:20).

Dalam Teori Grindle (1997) dalam konteks Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sumber daya manusia pemerintah desa yang professional dan teknis di antaranya : Pendidikan dan latihan, pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi lingkungan kerja dan proses rekrutmen yang tepat.

Dalam Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah, kapasitas diartikan sebagai kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Putri,2005). Dalam Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah dalam Rangka Mendukung Desentralisasi, Kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas, Tahun 2002 disebutkan bahwa pengembangan dan peningkatan kapasitas meliputi tiga tingkatan, yaitu: 1) Tingkat

sistem, yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu 2) Tingkat kelembagaan atau entitas, yaitu struktur organisasi, proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi 3) Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/ wawasan, sikap (*attitude*), etika dan motivasi individu yang bekerja dalam suatu organisasi.

Dalam rumusan lain United Nations Development Programme (UNDP) dalam Soeprapto (2010 : 12) menyatakan bahwa, “kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan”. Kapasitas juga dapat diartikan dalam konteks sistem yaitu suatu entitas bekerja untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan proses dan aturan-aturan baku tertentu. Lebih lanjut Brown dalam Soeprapto (2010 : 09) mendefinisikan “kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan”.

Menurut Aminah dan Susanto (2018) Kapasitas aparat yang memadai sangat menentukan keberhasilan desa untuk melakukan perbaikan pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kapasitas Pemerintah Desa dituntut untuk mampu merepon kebutuhan publik salah satu sektor yakni kebencanaan. Dimana bencana merupakan kondisi peristiwa yang berada diluar kemampuan manusia

yang menyebabkan kerugian jiwa maupun harta benda. Sehingga ini diperlukan sikap respon cepat dari *stakeholders* sebagai upaya kewajiban bersama salah satunya peran penting dari pemerintah desa.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas (*capacity building*) dalam pemerintahan desa. Namun secara khusus faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas meliputi hal lima yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki (Djumandi, 2006 : 154-156)

Selanjutnya, dimensi peningkatan kapasitas pemerintahan desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman. Tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh Pemerintahan desa yaitu: 1) kemampuan dasar 2) kemampuan manajemen dan 3) kemampuan teknis. Kemampuan dasar yang harus dimiliki perangkat desa adalah meliputi: pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Kemampuan manajemen meliputi: manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen asset, dan manajemen keuangan. Sedangkan Kemampuan Teknis meliputi: penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan Perdes, dan pelayanan publik (Asrori, 2014).

b. Konsep Pemerintahan

Pengertian Pemerintah Pemerintahan dan pemerintah merupakan dua kata yang memiliki pengertian berbeda. Pemerintah memiliki pengertian sebagai “organ” atau alat Negara untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan memiliki pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif.

dalam Menurut UUD 1945, pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Akan tetapi menurut Didik Sukaryono istilah pemerintahan dan pemerintah dalam masyarakat secara umum diartikan sama, di mana kedua kata tersebut dapat dikatakan bergantian (pemerintahan dan pemerintah). Kedua kata tersebut merujuk pada pejabat atau penguasa. Mulai dari Presiden sampai Kepala Desa, sehingga orang yang memegang jabatan disebut dengan pemerintahan atau pemerintah, sedangkan orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan pemerintahan atau pemerintah disebut dengan orang pemerintah(an).

c. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Istilah dari bahasa Inggris tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.

Pengertian pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara pengelolaan dan manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama antara orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif.

Istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.

Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan;

- a) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
- b) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan.
- c) Untuk mencapai efisien dan efektivitas.

Fungsi pengelolaan Banyak sekali fungsi pengelolaan atau manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah :

- a) Perencanaan (Planning) Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk

mencapai hasil yang diinginkan. perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

- b) Pengorganisasian (Organizing) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu
- c) pengarahannya (Actuating) pengarahannya adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
- d) pengawasan (Controlling) Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Untuk pengelolaan potensi desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama

d. Potensi Desa

Potensi adalah suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan,

daya. Jadi potensi desa ialah daya kekuatan kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah desa dengan kemungkinan bisa dikembangkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Desa menyebutkan, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya.

Secara umum potensi desa dapat dibedakan menjadi dua: Pertama: ialah potensi fisik yaitu tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan SDM. Kedua: ialah potensi non-fisik yaitu masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Potensi fisik

Potensi fisik merupakan potensi yang berhubungan dengan SDA yang ada dalam sebuah desa yakni berupa:

1. Lahan Lahan bukan hanya mencakup tempat tumbuhnya tanaman. Akan tetapi bisa sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu.
2. Tanah Di dalam tanah mencakup berbagai kandungan kekayaan. Contoh

tanah yang subur, tambang, dan mineral

3. Air Pada pedesaan potensi air yang bersih sangatlah melimpah. Dari dalam tanah, air didapatkan melalui pemompaan, mata air, atau penimbaan yang mana fungsinya sebagai faktor pendukung dalam kehidupan manusia.
4. Iklim Iklim selalu berkaitan dengan curah hujan dan temperatur yang sangat berpengaruh terhadap setiap daerah. Sebuah desa bisa maju karena faktor kecocokan iklim bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Misalnya tempat rekreasi, perkebunan buah, dan tempat peristirahatan sehingga corak iklim sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat desa.
5. Lingkungan geografis seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa
6. Ternak Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
7. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada.

Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa. b) Potensi Non-fisik Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya.

Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparaturnya, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri.

Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. Adapun potensi desa non fisik tersebut antara lain:

1) Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan.

2) Lembaga dan Organisasi Sosial, lembaga atau organisasi sosial merupakan suatu badan perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari, seperti :

- a) Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain
- b) Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompok pencapir, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain
- c) Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.
- d) Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa.

3) Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan

ketertiban pemerintahan desa. peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Contohnya : kepala desa, kepala dusun, kepala adat, dan lainlain. Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Sedangkan Berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga:

- a) wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat didaerah berpotensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis
- b) wilayah desa berpotensi sedang, terdapat didaerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis
- c) wilayah desa berpotensi rendah, terdapat didaerah pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan.

E. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui informan penelitian dan dokumen.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Nama Informan
1.	Wali Nagari Silayang	1	Asra
2.	Sekretaris Nagari Silayang	1	Zulkarnain
3.	Bendahara Nagari	1	Dodi, A.Md

	Silayang		
4.	Ketua BPD Nagari Silayang	1	Simel
5.	Ketua PKK Nagari Silayang	1	Melia Asra
Jumlah		5	

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kapasitas Pemerintah Nagari Silayang Dalam Mengelola Potensi nagari Silayang

1. Dimensi Sumber Daya Manusia

Dalam Teori Grindle (1997) dalam konteks Pengembangan Kapsitas Pemrintah Desa ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sumber daya manusia pemerintah desa yang professional dan teknis di antaranya : Pendidikan dan latihan, pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi lingkungan kerja dan proses rekrutmen yang tepat. Dari hasil wawancara peneliti bersama pak Wali Nagari Silayang tentang adanya pelatihan dan pendidikan yang diberikan atau di ikuti oleh pemerintah nagari adalah sebagai berikut :

“Untuk pelatihan tentang pengelolaan Potensi Nagari ini memang ada, biasanya oleh pemerintah yang buat, dan sekali-kali ada juga pelatihan di provinsi, pelatihannya pun yang paling sering tentang pengelolaan Potensi, keuangan dan administrasi, hanya saya, pak skretaris atau bendahara saja

yang biasa pergi, kalau untuk perangkat desa selain bidang keuangan dan administrasi jarang, kalau ada pun ya hanya sesekali dalam beberapa tahun". (Kepala Nagari Silayang, jam 08.00 wib)"

Dari Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa memang benar adanya pelatihan dalam pengelolaan potensi Nagari, namun perangkat Nagari yang dikutsertakan hanya bidang keuangan atau Sekretaris Nagari saja, sehingga pengetahuan tentang pengelolaan potensi desa/nagari tidak secara menyeluruh di pahami oleh perangkat nagari yang lain. Hal hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak sekretaris Nagari Silayang

beberapa pelatihan terkesan dilaksanakan hanya formalitas, materi yang diberikan tidak sesuai dengan problematika yang terjadi dilapangan. Peneliti juga melakukan wawancara kepada bendahara Nagari Silayang dan mendapatkan jawaban yang hamper sama.

Tanggapan Selanjutnya dari Bapak Simel tentang Pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh pemerintah Nagari. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak simel selaku ketua BPD Nagari Silayang dapat penulis simpulkan bahwa hasil tani di daerah Nagari Silayang sangat besar, namun belum memberikan keuntungan apa pun untuk nagari, karena masyarakatnya kurang peduli dan lebih mementingkan keuntungan pribadi.

2. Dimensi Penguatan Organisasi

Berdasarkan hasil dalam penelitian pengembangan kapasitas untuk mewujudkan tata manajemen meningkatkan kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas- tugas serta pengaturan struktur makro dalam pengelolaan potensi desa.

Grindle (1997:28) dalam bukunya merumuskan ada beberapa kegiatan bisa dilakukan dalam dimensi penguatan organisasi diantaranya: sistem insentif, pemanfaatan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Wali nagari silayang, bahwa dalam menjalankan kegiatan pengelolaan potensi nagari sudah dilakukan sistem penataan intensif, yaitu selain adanya intensif bagi setiap aparatur desa, perangkat desa yang tergabung dalam PPKPD dan TPK diberikan honor tambahan dan biaya operasional kegiatan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Zulkarnain selaku Sekretaris Nagari saat wawancara mengenai penataan intensif perangkat Nagari Silayang, yaitu sebagai berikut:

"untuk penataan isentif di Nagari Silayang sudah diatur dalam peraturan bupati dengan sistem penerimaan triwulan, kemudian untuk perangkat desa yang tergabung dalam kegiatan tim PPKPD akan mendapat insentif tambahan sebesar Rp. 200.000 setiap kegiatan"(Bapak Zulkarnain Sekretaris Nagari Silayang 25 Juni 2023 jam 10.00 wib di kantor Wali Nagari Silayang)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perangkat nagari yang masuk dalam tim PPKPD akan mendapat insentif tambahan di setiap kegiatan.

3. Dimensi Reformasi Kelembagaan

Dalam Pengembangan Pengelolaan potensi, Grindle (1997:28), merumuskan dimensi yang ketiga yaitu dimensi reformasi kelembagaan, dimensi ini dengan fokus: kelembagaan dan sistem

serta makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi. Dari hasil wawancara penulis dengan wali nagari silayang dapat di ambil kesimpulan bahwa memang aturan main politik dan ekonomi di di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap desa-desa termasuk Nagari Silayang itu sendiri.

2. Hambatan – Hambatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Potensi Nagari untuk Meningkatkan PADes Nagari Silayang

Dalam teori Grindle dikatakan bahwa pengembangan kapasitas dengan Dimensi Sumber Daya Manusia harus membentuk personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti pelatihan atau Pendidikan, pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi lingkungan kerja dan proses rekrutmen yang tepat. Lalu dimensi kedua yaitu dimensi penguatan organisasi dengan fokus: melakukan tata manajemen tepat untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi.

Dan yang terakhir Dimensi Reformasi kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi. Selanjutnya yang penulis lakukan setelah melihat teori, yang menjadi alat pertimbangan selanjutnya bagi penulis untuk menentukan kapasitas pemerintah desa adalah Observasi. Dalam observasi

yang penulis lakukan mengenai kapasitas Pemerintah Nagari Silayang Dalam Pengelolaan Potensi Desa masih terdapat banyak masalah yaitu :

1. Kurang nya pemahaman tentang pengelolaan potensi nagari sehingga tahapan-tahapan tentang Pengelolaan Potensi nagari tidak mampu diikuti, contohnya kurang nya perencanaan, minim nya ide, sehingga kreatifitas pemerintah nagari dalam pengelolaan potensi nagari menjadi terhambat.
2. Struktur manajerial Pemerintah Nagari Silayang dalam pengelolaan Potensi Nagari bisa dibilang tidak jelas yaitu tidak adanya SK tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan dan Potensi Desa (PPKPD).
3. Sistem Kepemimpinan Wali Nagari Silayang yang kurang terkelola dengan baik.
4. Kurang nya Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di buktikan dengan tidak adanya papan informasi tentang penggunaan Dana desa, sehingga kepercayaan dan komitmen masyarakat untuk sama-sama membangun dan mengelola potensi Nagari pun menjadi tidak ada.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Kapasitas Pemrintah Nagari Silayang Dalam Mengelola Potensi Nagari Silayang untuk Meningkatkan PADes, yang didapat dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dapat ditarik kesimpulan; Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Kapasitas Pemerintah Nagari

Silayang Dalam Mengelola Potensi Nagari Silayang masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih banyak yang menjadi penghambat dalam proses pengembangan kapasitas pemerintah itu sendiri.

Dari hasil yang di dapat bahwa dimensi sumber daya manusia pemerintah Nagari Silayang secara personalitas belum bisa dikatakan professional dan berkompoten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, misalnya sebagian besar perangkat Nagari masih belum memahami regulasi yang ada, dan juga kepemimpinan Pemerintah Nagari yang belum sepenuhnya Responsif. Dalam dimensi penguatan organisasi harus dilakukan evaluasi secara berkala, evaluasi yang dilakukan adalah bagaimana menyeragamkan pemahaman untuk mencapai tujuan bersama dari pada tujuan dan kepentingan individu, selalu menjaga stabilitas organisasi, serta mendorong kesatuan komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi organisasi relatif stabil. Dalam dimensi reformasi konstitusi adanya Reformasi peraturan yang melemahkan kapasitas Pemerintah desa, Sistem kelembagaan, dan penguatan organisasi.

2. Saran

1. Meningkatkan Kedisiplinan Perangkat Nagari, serta menguatkan komitmen dalam meningkatkan kinerja yang profesionalitas dengan membuat sanksi yang tegas ketika ada perangkat nagari yang belum tepat waktu masuk kantor.
2. Melakukan sistem rekrutmen perangkat nagari dengan menggunakan sistem yang selektif dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
3. Melakukan manajemen personal yang baik, dengan cara meningkatkan kualitas perangkat nagari melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari maupun pemerintah daerah.
4. Mencari sumber dana dengan melakukan pendekatan kepada pihak swasta untuk mau berinvestasi di Nagari Silayang sehingga pemerintah Nagari mendapatkan suntikan dana untuk mengelola potensi tersebut.
5. Melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada seluruh masyarakat Nagari Silayang dengan tujuan terciptanya swadaya masyarakat dalam mengelola Potensi Nagari Silayang.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Anggi. 2021. *“Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa.”* Jurnal Health Sains.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *“Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek / Suharsimi Arikunto.”* Rineka Cipta.
- Arry. 2014. *Demokrasi Dan Otonomi Daerah Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa.*
- Drs. H. Malayu, S.P. Hasibuan, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta : Cetakan 9. PT. Bumi Aksara
- Fajarwati, Neri. 2019. *“Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance.”* Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik 22(2): 219–34.
- Grindle, M. S. 1997. *“Gretting good Governance : Capacity Building in Public Sector of Developing Countrie:,”* Boston, MA : Harvard

- Institute for internasional Development
- Imam Hardjanto, 2006. *Pembangunan Kapasitas Lokal (Local Capacity Building)*.
- Kanal Informasi. 2019. "Home » Referensi » *Pengertian Instrumen Penelitian Menurut Para Ahli (Arikunto, Sugiyono, Dkk) Pengertian Instrumen Penelitian Menurut Para Ahli (Arikunto, Sugiyono, Dkk)*." *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*.
- Latief, Muh. Iqbal, Arsyad Genda, Suriyanto Suriyanto, and Hariashari Rahim. 2020. "*Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengelola Konflik Sosial Di Kabupaten Bone*." *Unri Conference Series: Community Engagement 2: 514–21*.
- Linda, Irma. 2019. "*Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa Di Desa Sukajaya Kecamatan Cimeruk Kabupaten Pangandaran*." *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 6: 231–40*.
- Lisyana, Rima. 2012. "*Efektivitas Pengelolaan Potensi Desa Oleh Ppemerintah Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten*." *Jurnal Ilmu Ilmiah Pemerintahan*.
- Ma'ruf, Muhammad Farid, Badrudin Kurniawan, and Rizky Purna Aji Galih Pangestu. 2018. "*Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul)*." *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara 7(2): 193–203*.
- Malang, Muhammadiyah. 2016. "*Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government ...*" (September).
- Miswar Tumpu. 2021. *Pengelolaan Potensi Desa (Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat)*. TOHAR MEDIA.
- Mussardo, Giuseppe. 2019. "BAB III *Metode Penelitian Menurut Sugiyono 2017*." *Statistical Field Theor*.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan et al. 2019. "*Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi 7(1): 5*.
- Sugiyono. 2013. "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,*
- Suranny, Lilyk Eka. 2020. "*Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Wonogiri*." *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*.